

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Kegiatan Pertemuan dalam Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pencegahan dan Penanganan Stunting di Desa Cibedug Kecamatan Ciawi

Irma Purnama¹ Muhaemin Hatriadi², Jayanti Merdekawati³

Program studi Administrasi Publik, Universitas Dzuanda Bogor, Jawa Barat,
Indonesia

e-mail¹ : muhaeminharriadi@gmail.com

e-mail² : jayanti.merdeka@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah kegiatan pengentasan kemiskinan yang menyalurkan bantuan berupa bantuan tunai/langsung dengan ketentuan dengan syarat sehingga mendorong perubahan perilaku, kemandirian, serta cara pandang dalam hal kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan menyeluruh secara sosial dan menghasilkan aktivitas yang lebih produktif. Program tersebut dilaksanakan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) atau dikenal dengan Family Development Session (FDS) yang merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan. Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan PKH dan P2K2 di berbagai daerah menunjukkan dampak positif sehingga dapat dikatakan program-program tersebut dalam meminimalisir kemiskinan dan meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan yang dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Bogor Khususnya di Desa Cibedug yang dimulai pada 03 Juli 2023 sampai 03 Agustus 2023 . Dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan dan koordinasi dari pihak terkait dengan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dari program ini sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui program ini. Maka dari itu Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dalam Pencegahan Stunting sangat diperlukan.

Kata Kunci : PKH, Stunting

PENDAHULUAN

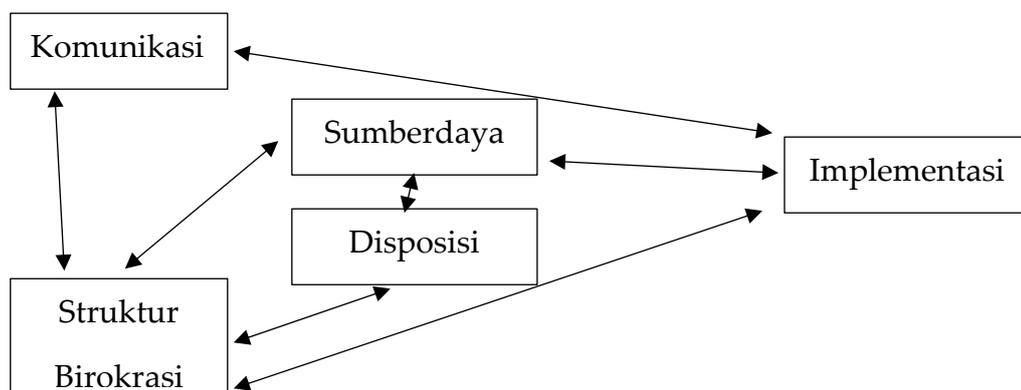
Pelaksanaan kebijakan tidak hanya sekadar menjalankan suatu aktivitas. Implementasi adalah serangkaian proses yang kompleks dan rumit karena

menjalankan sesuatu tepat pada waktunya dan sesuai prosedur bukan jaminan bahwa implementasinya sudah optimal.

Kebijakan merupakan tahap yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang dikemukakan oleh individu, kelompok, atau pemerintah terhadap suatu lingkungan tertentu, dengan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada sambil mencari peluang untuk meraih tujuan atau pencapaian yang diinginkan. Terutama, ini berkaitan dengan peran fungsional pemerintah dalam melayani masyarakat di ranah publik guna mengatasi kesenjangan yang berkembang dalam bermasyarakat, diperlukan tindakan kebijakan guna mengimplementasikan fungsi dan tanggung jawab negara serta sebagai langkah menuju pencapaian tujuan pembangunan.

Menurut Edwards (1980), dalam mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu terdapat persoalan teknis dan persoalan manajerial yaitu Implementasi kebijakan seperti yang dapat dilihat dimana tahap pengimplementasian dan penetapan kebijakan seperti pengesahan tindakan legislatif, penerbitan dari perintah eksekutif untuk penyerahan keputusan dari yudisial, atau sebagai pengumuman pengaturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi yang dipengaruhinya.

Model pelaksanaan yang diajukan oleh Georgev C Edward III (1980) bisa disimak melalui ilustrasi yang terlampir di bawah ini.



Dengan begitu, penerapan kebijakan publik menghasilkan konsekuensi yang berdampak terhadap masyarakat yang menjadi target dalam proses pelaksanaan

ketetapan publik tersebut. Dampak ini positif sesuai yang diharapkan, tetapi juga bisa mengakibatkan efek yang tidak diinginkan yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Selanjutnya Edwards III (1981) mengungkapkan 4 variabel yang memiliki pengaruh dalam pengimplementasian kebijakan variabel-variabel yang memengaruhi pelaksanaan keputusan.

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efisien, siapapun yang bertanggung jawab atas pelaksanaan keputusan mesti paham apa saja yang harus dilakukan terhadap perintah untuk menerapkan kebijakan yang di transmisikan ke personel yang tepat, lugas, akurat, dan sistematis.

2. Pencarian

Sumber daya merupakan hal yang penting termasuk staff dengan ukuran yang tepat menjadi keterampilan yang diperlukan membutuhkan informasi yang sangat relevan, memadai, dan fasilitas seperti bangunan, peralatan/perlengkapan, tanah dan persediaan.

3. Disposisi atau Sikap

Implementasi akan berjalan dengan efisien jika pelaksana mengetahui apa saja yang harus dipenuhi dan memiliki kemampuan untuk melakukan yang seharusnya dilakukan, pelaksana juga mesti mampu mengentaskan berbagai kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Implementasi bisa saja tidak terlaksana jika kurangnya arahan birokrasi dan fragmentasi dari organisasi sehingga mampu menyalakan koordinasi yang dibutuhkan.

Peningkatan kesejahteraan sosial menjadi hal yang penting bagi seluruh negara di seluruh dunia. Salah satunya rintangan yang menghadapinya adalah permasalahan kemiskinan dan disparitas sosial. Kemiskinan dan kesenjangan sosial

adalah tantangan seluruh dunia yang melibatkan semua negara. Isu kekurangan dan maraknya kesenjangan sosial juga mempengaruhi negara yang sedang berkembang atau memiliki tingkat perkembangan yang rendah, tetapi juga mempengaruhi negara maju meskipun angka prevalensinya lebih rendah.

Program Keluarga Harapan (PKH) hadir sebagai suatu inisiatif kebijakan yang diadopsi oleh pemangku kebijakan dengan tujuan dapat mengatasi persoalan kesenjangan sosial di Indonesia. Secara umum, ide dari kebijakan ini sering kali terhubung dengan keputusan yang konsisten dan terus-menerus dilakukan oleh pembuat kebijakan serta diikuti oleh mereka yang harus mematuhi keputusan tersebut.

Dalam upaya mengurangi masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Bogor, pemangku kebijakan daerah bekerja sama dengan Dinas Sosial mengimplementasikan beragam program dan rangsangan guna mengatasi persoalan kemiskinan di wilayah tersebut. Salah satu langkah khusus yang diambil pemerintah adalah merilis Peraturan Menteri Sosial (Permensos) yang didasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 2018 yang berisikan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah inisiatif untuk menyalurkan bantuan sosial terkondisi kepada individu / keluarga yang mengalami kemiskinan melalui penyediaan dana tunai dengan persyaratan tertentu. Salah satu maksud utama dari PKH adalah mengubah pola perilaku serta mempromosikan kemandirian pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama dalam mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Proses Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga (P2K2) merupakan upaya belajar masyarakat sebagai solusi yang menguatkan adanya perubahan perilaku. Dari keseluruhan, P2K2 bermaksud meningkatkan kualitas pemahaman tentang signifikansi pembelajaran, kesehatan, dan manajemen keuangan mandiri untuk keluarga.

Perubahan perilaku kemampuan keluarga merujuk pada proses di mana keluarga atau anggota keluarga mengalami perubahan dalam pola pikir, sikap, dan tindakan yang mendukung peningkatan kemampuan keluarga dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan kesejahteraan secara umum. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), perubahan perilaku kemampuan keluarga berfokus pada upaya membantu keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan pemahaman dan praktik terkait akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendekatan edukatif lainnya, diharapkan keluarga dapat mengubah perilaku mereka dalam hal memanfaatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang tersedia, meningkatkan pengetahuan tentang kesadaran pentingnya pendidikan dan kesehatan, serta mengelola keuangan dengan lebih baik. Perubahan perilaku kemampuan keluarga penting untuk menciptakan kemandirian dan peningkatan kualitas hidup keluarga, serta berdampak positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu komunitas atau negara.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang cenderung deskriptif dan sering melibatkan analisis secara mendalam (Nasution, A. F. 2023). Data yang diperoleh dapat diklasifikasikan dan diuraikan dalam kalimat-kalimat terpisah berdasarkan kategori untuk menghasilkan kesimpulan. Penelitian ini mengumpulkan informasi dalam bentuk kata-kata dan deskripsi, bukan dalam bentuk numerik dan juga data yang didapat diperoleh dari staff umum kepegawaian (Umpeg), kemudian diperoleh naskah-naskah, wawancara, dan penelitian terdahulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dilakukan selama satu bulan sejak 03 Juli 2023 - 03 Agustus 2023 yang diawali dengan penerimaan sebagai mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL).

Kemudian, Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat selama satu bulan di Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Lalu dalam setiap harinya diisi dengan kegiatan pengimplementasian program Keluarga Harapan dan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya di Desa Cibedug.

Sesuai dengan Teori Edwards III yang mengatakan bahwa terdapat tiga variabel indikator dalam implementasi kebijakan seperti penyampaian (Transmission), Kejelasan (Clarity) dan Konsistensi (Consistency).

Sehingga selama saya berada di Dinas Sosial Kabupaten Bogor penyusun banyak melakukan hal untuk keberlangsungan dan kelancaran program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dimana program tersebut berupa pemberian penyuluhan kepada warga dampingan dan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Program pemberian penyuluhan adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, atau masyarakat supaya memberikan informasi, edukasi, dan pelatihan kepada individu atau kelompok dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, lingkungan, dan lainnya.

Tujuan dari program pemberian penyuluhan adalah untuk memberikan pengetahuan yang relevan dan bermanfaat kepada target audiens, sehingga mereka dapat membuat keputusan terbaik dan mengadopsi praktik-praktik yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Rapat koordinasi adalah pertemuan yang diadakan antara berbagai individu, kelompok, atau departemen dalam suatu organisasi atau lembaga dengan tujuan untuk berdiskusi, berbagi informasi, menyelaraskan rencana, dan mengoordinasikan langkah-langkah kerja atau tindakan yang akan diambil. Rapat koordinasi memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa berbagai bagian atau pihak yang terlibat dalam suatu proyek, program, atau inisiatif dapat bekerja secara sinergis, menghindari tumpang tindih, dan mencapai tujuan bersama secara efektif.

KESIMPULAN

Dalam Kuliah Kerja Lapangan (KKL) ini banyak pengetahuan dan wawasan yang didapat di bagian Bidang Keamanan Dan Jaminan Sosial di mana bidang tersebut membawahi tiga subkordinasi diantaranya seksi perlindungan warga yang tertimpa bencana, penanganan fakir miskin, penjaminan sosial dan keluarga. Didasarkan pada hasil dari Kegiatan KKL tersebut pada Dinas Sosial Kabupaten Bogor, maka Penyusun membuat kesimpulan akhir yang didasarkan pada hasil dari pelaksanaan KKL pada bidang kerja Perlindungan/keamanan serta Jaminan Sosial yang berfokus pada bagian penjaminan terhadap kegiatan sosial dan keluarga memiliki peran penting di dalam pelaksanaan program yang bernama keluarga harapan dalam bentuk kegiatan Pertemuan sebagai Peningkatan Kemampuan Keluarga atau (P2K2) dalam hal pencegahan dan penanganan stunting di Desa Cibedug.

Maka dari itu penyusun membuat suatu kesimpulan bahwa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial sangat efektif dan tepat sasaran dalam hal mengentaskan dan penanganan stunting lewat kegiatan pertemuan dalam rangka peningkatan kemampuan keluarga (P2K2). Dalam rangka percepatan pencegahan dan penanganan stunting sekaligus pengembangan kebijakan pada bidang kesehatan sosial. Pelaksanaan PKH yang ada di Indonesia diharapkan dapat berjalan terus meskipun terjadi penggantian kepemimpinan karena menurut saya program PKH membantu pemerintah dalam menurunkan angka penderita stunting di Indonesia.

REFERENSI

- Sikhah, I. M. & Mohammad, N. A. (2022). "Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Keluarga". Jurnal Ilmiah Sultan Agung.
- Edi, S. & Djuni, T. (2012). "Program Keluarga Harapan (Pkh): Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa". STKS Bandung.
- Arlina, M. G. & Umar, N. (2021) "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH)

dalam Peningkatan Kesejahteraan Keluarga di Desa Liliawang Kecamatan Bengo Kabupaten Bone (Studi Kasus : PKH Bidang Pendidikan)” Universitas Negeri Makasar. (Jurnal Ilmu Sosiologi Dialektika Kontemporer).

Murah. (2016). “Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Investasi Sosial”. Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani. Journal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani.

Syahputra, A. S. & Risna, R. “Program Keluarga Harapan (Pkh): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan”.

Turhindayani & Abdul, H. “Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah”.